

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN JUMLAH
PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

**IRDAYANI
NIM. 105710224015**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN JUMLAH
PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

**IRDAYANI
105710224015**

Diajukan untuk Memenuhi salah satu syarat Penelitian pada Program

Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku yang banyak memberiku bantuan moril dan materialnya. Tak lupa juga juga siapa yang dibelakang ini yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan doanya. Ku persembahkan kepada kalian sahabat-sahabatku dan seperjuanganku.

Terima Kasih Ayah.

Terima kasih Ibu.

Terima Kasih Saudara-saudaraku tercinta.

MOTTO

Kegagalan itu merupakan proses dalam mencapai keberhasilan. Lupakan kegagalan, tapi ingatlah selalu hikmah dari kegagalan tersebut. Kesabaran akan membawa keberuntungan. Formula dari kesuksesan adalah berusaha, bersabar dan berdoa. Tidak ada kata mustahil jika kita berusaha dan percaya.

“ Dan Allah bersama orang orang yang sabar.” (Qs. Al-Anfal ayat 66)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat :Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : " Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Jumlah
Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Makassar "

Nama Mahasiswa : IRDAYANI
No. Stambuk/NIM : 105710224015
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia
Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 di Ruang
Aula mini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeristas Muhammadiyah Makassar.

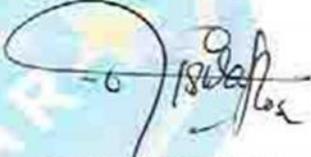
Makassar, 31 Agustus 2019

Menyetujui.,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Mahmud Nuhung MA
NIDN: 0902025701


Asdar, SE., M.Si
NIDN: 0903039102

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi


Ismail Rasitong, SE., MM
NIDN: 0905107302


Hi. Naidah, SE., M.Si
NBM: 710551



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat :Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **IRDAYANI**, NIM 105710224015 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 130/ Tahun 1440 H/2019 M. Tanggal 31 Agustus 2019 M sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Dzulhijjah 1440 H
31 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Pengawas Umum : | Prof. Dr. H. Abdul Rahman SE, MM
(Rektor Unismuh Makassar) | |
| 2. Ketua : | Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | |
| 3. Sekretaris : | Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | |
| 4. Penguji : | 1. Dr.H.Andi Jam'an,SE.,MM
2. Dr. Akhmad, SE.,M.Si
3. Ismail Rasulong,SE.,MM
4. A.Nur Achsanuddin UA.SE.,M.Si. | |

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Ismail Rasulong, SE., MM
NIDN : 090510730



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRDAYANI
Nim : 105710224015
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Dengan Judul : "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Jumlah
Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Makassar"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi ini saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2019



Diketahui Oleh:

Dekan



Ketua Program Studi

Hj. Naidah, SE.,MSi
NBM : 710551

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda Firman dan Ibunda Mariati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan ucapan terimakasih yang saya haturkan kepada orangtua dan saudaraku yang telah memberikan dukungan penuh demi keberhasilan penulis menyelesaikan pendidikan strata satu di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitupula penghargaan setinggi-tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M.**, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak **Ismail Rasulong, SE., MM.**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu **Hj. Naidah, SE., M.Si.**, Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak **Dr. H. Mahmud Nuhung, MA.**, Selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan , memotivasi penulis sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak **Asdar, S.E., M.Si.**, Selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan , memotivasi penulis sehingga skripsi selesai dengan baik.
6. Ibu **Warda, SE., M. E.**, Selaku penasehat akademik yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam menyelesaikan permasalahan pada dunia perkuliahan.
7. Para **Dosen dan Staff** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar atas segala jerih payahnya membimbing penulis selama dibangku perkuliahan.
8. Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Pendapatan Daerah besertastaf/karyawan yang telah bersedia menerima dan memberikan data/informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan yang menjadi teman untuk belajar, berbagi dan teman curhat dalam proses perkuliahan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dalam terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua yang turut membantu dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, Olehnya penulis

menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khaerat, Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Makassar, 4 Juli 2019

Penulis

ABSTRAK

IRDAYANI, Tahun 2019. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar, Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Mahmud Nuhung dan Asdar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS versi 2.3 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar, dimana koefisien regresi sebesar 1,108 dengan tingkat signifikan sebesar 0,011 ($0,011 < 0,05$). Sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar, dimana koefisien regresi sebesar -5,861 dengan tingkat signifikan sebesar 0,003 ($0,003 < 0,05$).

Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ABSTRACT

IRDAYANI, 2019. The Effect of Government Expenditures and Population on the Regional Original Income (PAD) of Makassar City, Thesis of Economic Development Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University, Makassar. Supervised by Mahmud Nuhung and Asdar.

This study aims to determine the effect of government spending and population on the Original Regional Revenue in Makassar City. The analytical method used in this study is multiple linear regression. Based on the calculation of SPSS version 2.3 shows that government spending does have a significant effect on Regional Original Revenue (PAD) in Makassar City with a significant level of 0,022 ($0.011 < 0.05$). While the population has a negatif and significant effect on the Original Local Revenue with a significance level of 0,003 ($0,003 < 0.05$).

Keywords: Government Expenditures, Population Amount, and Local Revenue

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Perumusan masalah	4
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengeluaran Pemerintah.....	6
B. Belanja Daerah	9
C. Jumlah Penduduk	12
D. Pendapatan Asli Daerah.....	14
E. Hubungan pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk terhadap PAD.....	20
F. Tinjauan Empiris	21

G. Kerangka Konsep.....	24
H. Hipotesis	24
BAB III. METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	27
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.....	36
C. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kota Makassar	39
D. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Makassar	41
E. Analisis Regresi Linear Berganda	43
F. Pembahasan.....	48
BAB V. PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Makassar Menurut Kecamatan Makassar... ..	34
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Makassar	35
Tabel 4.3 Rincian Penerimaan Daerah Tahun 2011-2015	36
Tabel 4.4 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2015.....	38
Tabel 4.5 Rincian Kegiatan Pengeluaran Pemerintah Tahun 2011-2015... ..	40
Tabel 4.6 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kota Makassar	41
Tabel 4.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Makassar	43
Tabel 4.8 Hasil Deskriptif Statistik.....	44
Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Regresi Berganda	45
Tabel 4.10 Hasil Estimasi Model Pendapatan Asli Daerah.....	46
Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Uji F (Secara Simultan)	47
Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Uji t (Secara Parsial)	48

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar Kerangka Pikir.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlakunya otonomi daerah, kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang lebih luas. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia UU RI Nomor.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU RI Nomor.32 tahun 2004 tentang pembagian urusan pemerintah, juga dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu, ada 16 kewenangan yang dimiliki oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri. Pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Dalam mendukung terselenggaranya otonomi daerah yang optimal, maka diberlakukannya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan ini di atur dalam UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan. Desentralisasi fiskal yang di atur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 terdiri dari tiga macam yaitu pajak daerah (*tax assignment*), dana bagi hasil (*revenue sharing*) dana alokasi umum sertadana alokasi khusus. Desentralisasi fiskal ini pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya sehingga

pemerintah daerahmandiri dalam pengelolaan keuangannya dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Kemandirian ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah, seperti diatur dalam UU RI No. 33 tahun 2004 pasal 6 tentang perimbangan keuangan dalam UU RI No. 33 tahun 2004 pasal 2 di jelaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsisten keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Pemerintah pusat juga bertugas untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan fiskal di daerah, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan. Dalam UU RI No. 33 tahun 2004 pasal 3 tentang perimbangan keuangan dijelaskan dana pemerintah dan pemerintah bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dana perimbangan ini dari terdiri dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Berdasarkan UU RI No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah. Soleh dan Rochmansjah (20010:20) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat). Menjelaskan bahwa sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil, sedangkan proporsi PAD masih relatif

kecil. Adanyadana perimbangan melalui DAU ini ternyata justru menjadi ketergantungan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang di gali dalam wilaya daerah yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain. Pendapatan Asli Daerah juga digunakan sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah (Darise, 2009: 48).

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan resmi daerah yang terus diupayakan untuk ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan dan penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat sehingga kemandirian dan otonomi daerah yang semakin nyata, dinamis dan bertanggungjawab dan dapat terwujudkan.

Peran pemerintah dijadikan sebagai tolak ukur pertumbuhan suatu perekonomian yang dapat dilihat dari pengeluaran pemerintah terutama dalam sektor pelayanan publik. Sebagian pengeluaran pemerintah untuk membiayai administrasi pemerintah dan sebagian lain untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam pembangunan infrastruktur suatu wilayah atau daerah, oleh sebab itu pemerintah mempunyai kekuatan untuk mengatur dan mengawasi perekonomian, disamping itu pemerintah juga melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya (Deliamov 2008: 168).

Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung,

termaksud anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lainnya untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Pembelanjaan dan tingkat kegiatan ekonomi. Meningkatnya kegiatan ekonomi maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut maka peneliti akan mengkaji lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar yaitu **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar ?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar ?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis yaitu sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti untuk peneliti selanjutnya tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun berikutnya.
2. Manfaat teoritis yaitu sebagai bahan bagi pemerintah dalam mengkaji kebijakan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung diakui oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak, Pada umumnya pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata.

Pada tingkat daerah, pengeluaran pemerintah atau belanja daerah tercermin pada anggaran (APBD) yang memuat semua biaya yang akan digunakan untuk menutupi semua belanja daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah sehari-hari ataupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Rindu K (2009 ; 23) dalam struktur yang baru, sisa lebih APBN tahun lalu dan pinjaman (utang) tidak lagi dimasukkan sebagai unsur penerimaan daerah, namun di masukan sebagai pembiayaan

daerah, sedangkan anggaran belanja rutin dan pembangunan yang ada pada struktur APBN sebelumnya di arahkan menjadi belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan serta belanja modal yang diklasifikasikan dalam belanja aperatur daerah dan belanja pelayanan publik, dengan struktur yang baru akan lebih mudah mengetahui surplus dan defisit dari anggaran dan pendapatan belanja daerah sehingga meningkatkan transparansi informasi anggaran kepada masyarakat (publik).

Wanimbo (2013;11) pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan angkatan kerja pun memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi seperti penelitian yang di lakukan oleh Amuna (2012;11), menunjukkan bahwa dana alokasi khusus (DAK), pendapatan asli daerah (PAD), dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kewenangan ekonomi daerah adalah keseluruhan kewenangan penyelenggaraan pemerintah, seperti perencanaan, perizinan, pelaksanaan, kecuali kewenangan di bidang-bidang pertahanan keamanan, peradilan, politik luar negeri, moneter/fiskal dan agama serta kewenangan lainnya yang di atur oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan otonomi di tingkat provinsi meliputi kewenangan-kewenangan lintas kabupaten dan kota, dan kewenangan yang tidak atau belum di laksanakan daerah otonom kabupaten dan kota, serta kewenangan pemerintah lainnya. (safitri 2009 : 20).

Halim Abdul & Mujib Ibnu (2009: 19) menjelaskan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 mengatur perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu berupa sistem keuangan daerah yang diatur berdasarkan pembangian kewenangan, tugas dan tanggung jawab antar tingkat pemerintah sesuai dengan peraturan UU tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi ruang lingkup pengaturan dari :

1. Prinsip-prinsip pembiayaan fungsi pemerintah di daerah
2. Sumber-sumber pembiayaan fungsi dan tugas tanggung jawab daerah yang meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - b. Dana Perimbangan
 - c. Pinjaman
 - d. Pembiayaan pelaksanaan asas dekonsentrasi bagi provinsi
 - e. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah
 - f. informasi keuangan daerah

Berdasarkan UU RI No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan dana pemerintah daerah pasal 27 jumlah dana alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dilaksanakan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Yang dimaksud celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurang dengan kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan UU RI No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 28 yang dimaksud kebutuhan fiskal daerah adalah merupakan kebutuhan

pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, sedangkan yang dimaksud kapasitas fiskal daerah adalah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil.

B. Belanja Daerah

Pajak daerah yang identik dengan pajak memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli yaitu pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah disamping retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

Berdasarkan permendagri No. 13 tahun 2006, belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten /kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah yang di tetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Mardiasmo (2008:12-13) istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain :

- a. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

- b. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas, sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam permendagri No 13 tahun 2006 pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Yang dimaksud urusan wajib adalah sebagai berikut: pendidikan, kesehatan, pekerja umum, perumahan rakyat, penataan ruangan, perencanaan pembangunan, perhubungan, pertahanan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, sosial, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik luar negeri, pemerintah umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, komunikasi dan informatika. Sedangkan yang dimaksud urusan pilihan sebagai berikut: pertanian, kehutanan, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, transmigrasi.

Belanja menurut urusan pemerintah penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undang di jabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklarifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasa dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari :

- 1) Pelayanan umum
- 2) Ketertiban dan ketentraman
- 3) Ekonomi
- 4) Lingkungan hidup
- 5) Perumahan dan fasilitas umum
- 6) Kesehatan
- 7) Pariwisata dan budaya
- 8) Pendidikan
- 9) Perlindungan sosial

Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) permendagri No. 13 tahun 2006 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program. Yang termaksud belanja tidak langsung adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja pegawai
- 2) Belanja bunga
- 3) Belanja subsidi

- 4) Belanja hibah
- 5) Bantuan sosial
- 6) Belanja bagi hasil
- 7) Bantuan keuangan
- 8) Belanja tidak tertuga

Kegiatan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang termaksud belanja langsung sebagai berikut:

- 1) Belanja modal

Belanja modal untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

- 2) Belanja barang dan jasa

Belanja dan jasa barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dsan kegiatan pemerintah daerah.

C. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu daerah atau Negara serta mentaati ketentuan-ketentuan dari daerah atau negara tersebut. Besarnya Pendapatan Asli Daerah dapat di pengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka

pendapatan yang di tarik juga akan meningkat (simanjuntak 2011 :732). Penduduk merupakan sumber daya utama yang berpengaruh besar terhadap pembangunan di suatu wilayah menurut Population Reference Bureau (PRB 2011).

Penduduk adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia (UU No. 24 tahun 2013). Jumlah penduduk merupakan faktor penentu adanya disparitas pendapatan antar daerah. Penambahan penduduk merupakan suatu hal yang dibutuhkan, dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Jaya dan Widanta 2014: 202).

Anata (2008:37) menjelaskan bahwa, penduduk adalah yang berdomisili di wilayah geografi Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap, baik yang produktif atau tidak produktif. Penduduk yang produktif merupakan harapan dari pemerintah daerah, semakin penduduk produktif maka semakin besar kesempatan kerja yang tercipta, selain itu juga jumlah penduduk kota yang diimbangi dengan SDM yang telah terdidik akan membantuh membangun pamarintah daerah. Oleh karena itu penduduk sangat menentukan perekonomian di pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Jadi penduduk diharapkan, tetapi di imbangi dengan kesempatan kerja serta perekonomian baru yang kemudian pada jangka panjang akan lebih mengarah pada pembangunan pemerintah.

Adapun hukum Wagner (dalam Mangkoesoebroto, 2010:171) mengutarakan bahwa dalam suatu perekonomian di dalam masyarakat, apabila jumlah pendapatan meningkat perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat karena disebabkan adanya penerimaan pendapatan yang melalui pajak dan retribusi didalam kegiatan ekonomi.

Adam Smith (dalam Santoso dan Retno, 2010: 16) berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris tentang pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dapat menaikkan *output* melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar, dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk yang tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi didalam produksi. Penambahan penduduk merupakan salah satu hal yang dibutuhkan dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat di tarik juga meningkat.

D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga digunakan sebagai sumber penerimaan yang di gunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian

suatu wilayah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam pembiayaan kegiatan rutin maupun pembangunannya yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah (NN, 2014:16).

Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU RI No.33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sistem pembagiannya yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembaruan.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU RI No. 28 tahun 2009 tentang perimbangan keuangan yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah,

retribusi daerah dan lain lain serta penerimaan keuangan tersebut di atur oleh daerah.

Menurut Badan Pusat Statistik (2008:10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya, jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam rencana kemandirian pemerintah daerah yang tidak ingin terlalu tergantung dari APBN, kemajuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dari perkembangan PAD yang positif disisi penerimaannya dan peranannya dari tahun ke tahun makin meningkat.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, di lain pihak menyebabkan pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun bangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan pemerintah daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pratiwi, 2008:16).

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. (Safitri,2009 :24).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan hasil yang di peroleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolah

APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Yani (2008 :73).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 1) Pajak daerah
 - 2) Retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan daerah yang di pisahkan dan
 - 4) Lain lain pendapatan daerah yang sah
- b. Pendapatan transfer
- c. Lain lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Yani (2008 : 74) PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan. Jenis jenis pendapatan daerah yang sah terdiri dari :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 5) Pendapatan denda pajak.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi sehingga bisa disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah

retribusi yang dipungut daerah karena adanya suatu balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang pemungut retribusi. (Prakaso, 2010: 20). Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

- 1) Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 3) Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan: pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas, tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagi hasilnya kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu. Pengaturan DBH dalam Undang-Undang ini merupakan penyelarasan dengan undang-undang RI No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang No 17 tahun 2000. Dalam Undang-Undang ini dimuat pengaturan mengenai bagi hasil penerimaan pajak penghasilan (PPH) pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri

dan pph pasal 21 serta sektor pertambangan panas bumi, selain itu dana reboisasi yang semula termaksud bagian dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diahlikan menjadi DBH.

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah yang dimaksimalkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formulah yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah, DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gab*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

Dalam undang-undang ini ditugaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah potensi fiskalnya, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Jadi Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya M Ribai subhanda lubis (2009; 9).

E. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk. Sementara itu pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk merupakan hubungan fungsional.

1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengeluara pemerintah

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tertentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastuktur pembangunan yang penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi.

2. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah penduduk

Adriani dan Handayani (2008:79) melakukan penelitian tentang pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap PAD yang hasilnya menunjukkan bahwa PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan

terhadap PAD, sedangkan jumlah penduduk mempunyai hubungan negatif dan pengaruh tidak signifikan secara persial terhadap PAD, tetapi secara bersamaan kedua variabel tersebut pengaruhnya adalah signifikan PDRB dan jumlah penduduk sangat kuat dengan PAD.

Santoso dan Rahayu (2008: 18) dengan dukungan bukti empiris, pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam maupun luar Negeri. Santoso dan Rahayu (2008:18) mengatakan, penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat di tarik juga meningkat.

F. Tinjauan Empiris

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa pedoman atau tinjauan empiris yang akan mendukung karena adanya kesamaan metodologi penelitian dan objek penelitian guna tercapainya hasil yang diharapkan, diantaranya:

Putu Lia Perdana Sari (2010) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, tingkat investasi dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Provinsi Bali Periode 2010-2014. Jenis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Peneliti ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan, tingkat investasi, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perdagangan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali periode 1991-2009 dan aspek perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Periode 2010-2014 terus mengalami peningkatan.

Harry A.P. Sitaniapessy (2011) meneliti tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan PAD. Peneliti menggunakan regresi berganda dan regresi sederhana. Peneliti ini bertujuan untuk menentukan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maluku Tengah Periode 2005-2011 dimana peneliti lebih memfokuskan pada tiga sektor yaitu sektor pengeluaran pemerintah yaitu sektor pertanian, perikanan serta perindustrian dan perdagangan karena ketiga sektor tersebut memiliki pengeluaran yang lebih besar dibanding sektor-sektor lain dan hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terdukung.

Erma dan Yuliana Florentina (2013) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor ekonomi yaitu produk domestik

bruto (PDRB) Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat yang menunjukkan variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Kapuas Luhul. Sedangkan variabel PDRB dan investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD Kabupaten Kapuas Luhul.

Khilyati Zam Zam (2016) meneliti tentang pengaruh pengeluaran pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah angkatan kerja, dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Solo Raya periode 2000-2014. Penelitian ini menggunakan regresi data panel. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, jumlah angkatan kerja memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian jumlah penduduk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Solo Raya.

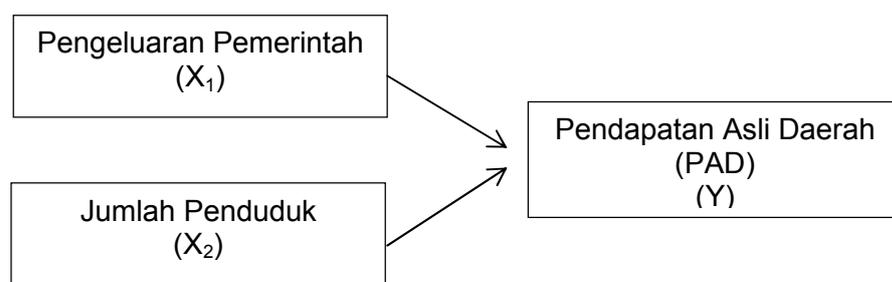
Arman dan Junaidi (2014) meneliti tentang pengaruh pendapatan (PAD), dana alokasi umum, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Peneliti ini menggunakan regresi data panel. Peneliti ini bertujuan bahwa dapat dilihat PAD dan DAU secara simultan dan parsial dapat meningkatkan belanja langsung dan belanja tidak langsung sementara jumlah penduduk mengurangi peningkatan belanja langsung. Hal ini berbeda dengan belanja tidak langsung yang memiliki efek positif karena pertumbuhan penduduk di kabupaten/kota di Jambi dapat

meningkatkan alokasi belanja pegawai sedangkan untuk belanja langsung terutama untuk belanja modal tidak efisien.

G. Kerangka Konsep

Berdasarkan pada uraian tinjauan pustaka, penelitian ini mengacuh antara pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui pengembangan menggunakan studi empiris penelitian ini mencoba mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan asumsi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk merupakan fungsi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konsep

H. Hipotesis

Berdasarkan teori/ kajian pustaka dan beberapa hasil penelitian hipotesis penelitian ini adalah :

1. Diduga bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.
2. Diduga bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.
3. Diduga bahwa pengeluaran pemerintah dominan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yakni kegiatan penelitian dalam usaha pencapaian kesimpulan atas hipotesis yang diajukan dengan melakukan analisis data-data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data-data yang disajikan dalam bentuk angka-angka yang meliputi data time series yaitu data yang disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih Kota Makassar sebagai obyek penelitian dengan menetapkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yang berlokasi di Jl. Urip Sumarhojo No.8, Kec. Makassar Kota Makassar dan data Pendapatan Asli Daerah, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi selatan yang berlokasi di Jalan.Haji Bau Nomor.6 Makassar.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih 2 bulan mulai bulan Mei sampai dengan Juli tahun 2019.

C. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Dalam penelitian ini dibagi kedalam dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen, masing-masing di jelaskan sebagai berikut: Variabel independen adalah variabel bebas yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya (terpengaruhnya) variabel dependen (variabel tak bebas). Variabel Dependen adalah variabel tak bebas yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Pengeluaran pemerintah daerah (X_1) adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, satuan dalam ribuan rupiah.
2. Jumlah penduduk (X_2) adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah yang memiliki mata pencarian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.
3. Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam pembiayaan kegiatan rutin maupun pembangunannya yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain lain penerimaan asli daerah yang sah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu studi kepustakaan (*library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*) pengumpulan data sekunder di lakukan dengan cara:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk pengambilan data yang bersifat teori yang kemudian digunakan sebagai literatur penunjang guna mendukung penelitian yang dilakukan. Data ini diperoleh dari buku-buku sumber yang dapat di jadikan acuan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dalam penulisan laporan ini, penulis mengambil data secara langsung pada obyek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

- a. Metode Observasi. Cara pengambilan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang sedang diteliti, dengan maksud untuk membandingkan keterangan-keterangan yang diperoleh dengan kenyataan.
- b. Dokumentasi. Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, buku, media elektronik, media cetak dan sebagainya. Metode ini dimaksudkan untuk mempelajari dan mengkaji secara mendalam data-data mengenai yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk di Kota Makassar terhadap Pendapatan Asli Daerah, penelitian ini menggunakan *metode analisis regresi berganda*. Analisis regresi berganda adalah suatu metode hubungan secara linier antara dua variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Dwi Priyatno 2011: 73).

Untuk menguji dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Secara matematis model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu$$

Keterangan :

Y	=	Pendapatan Asli Daerah
X_1	=	Pengeluaran Pemerintah
X_2	=	Jumlah Penduduk
A	=	Konstan
$\beta_1 \beta_2$	=	Koefisien Variabel
M	=	Error Term

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis *regresi linear berganda* yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi *logistik* atau *regresi ordinal*. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear, misalnya uji multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data *cross sectional*.

a. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu observasi ke observasi yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut *homoskedastisitas*. Deteksi uji hetero dapat dilakukan dengan metode *Uji Glejser* yaitu dengan melihat nilai signifikansi nilai di atas tingkat $\alpha = 0.05\%$ sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi suatu periode t dengan periode sebelumnya $(t-1)$. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data *time series* (runtut waktu) dan tidak perlu dilakukan pada data *cross section* seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serentak pada saat yang bersamaan.

Model regresi yang baik tidak terjadi autokorelasi. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi, maka dilakukan pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson. Menurut Siggih Santoso (2010:215), Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut:

- 1) Jika nilai DW antara nilai DU dan $(4-DU)$ atau $DU < DW < (4-DU)$ berarti bebas dari autokorelasi.
- 2) Jika nilai $DW > DL$ atau $> (4-DL)$ berarti terdapat autokorelasi.

2. Uji Statistik

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Penafsiran ini dimaksudkan untuk menentukan seberapa besar variabel tak bebas yang dapat dibebaskan oleh variabel-variabel bebasnya dengan menggunakan perhitungan koefisien determinasi (*determination coefficient*) yang disimbolkan dengan R^2 . Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$).

b. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Penggunaan tingkat signifikannya beragam, tergantung keinginan peneliti, yaitu 0,01 (1%), 0,05 (5%), 0,10 (10%). Uji F penulisan menggunakan taraf signifikan 0,10 (10%), jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka dapat dikatakan yang terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap terikat. Namun probabilitas nilai $f < 0,05$, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

c. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil Uji t dapat dilihat dari tabel *coefficients* pada kolom sig (significance), jika probabilitas nilai $t < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan begitu sebaliknya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kota Makassar terletak antara 119°24'17'38" BujurTimur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Maros

Sebelah Timur : Kabupaten Maros

Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa

Sebelah Barat : Selat Makassar

Berdasarkan segi kependudukan, Kota Makassar pada tahun 2015 jumlah penduduk mencapai 1.1449.401 jiwa terdiri dari laki-laki 717.047 dan perempuan 732.354 jiwa. Yang terbesar dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan dengan sex ratio 97,57 dengan luas wilayah 175,77 per km². Yang terluas dari 14 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Biringkanaya yaitu 48,22 km² dan tersempit adalah Kecamatan Mariso dengan luas wilayah 1,82 km². kecamatan terpadat adalah Kecamatan Makassar dengan jumlah penduduk 33.490/km² dan paling sedikit kecamatan Biringkanaya dengan jumlah penduduk 2.357/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kota Makassar Diperinci Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km²)	Presentase (%)
1	Mariso	1,82	1,04
2	Mamajang	2,25	1,28
3	Tamalate	20,21	11,50
4	Rappocini	9,23	5,25
5	Makassar	2,52	1,43
6	Ujung Pandang	2,63	1,50
7	Wajo	1,99	1,13
8	Bontoala	2,10	1,19
9	Ujung tanah	5,94	3,38
10	Tallo	5,83	3,32
11	Panakkukang	17,05	9,70
12	Manggala	24,14	13,73
13	Biringkanaya	48,22	27,43
14	Tamalanrea	31,84	18,11
	Jumlah	175,77	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2017

2. Pertumbuhan Penduduk

Pembangunan ekonomi tidak akan berlangsung secara berkesinambungan apa bila tidak didukung oleh penduduk yang memiliki kemampuan dan semangat kerja yang tinggi, sehingga mampu menggerakkan aktivitas dalam pemanfaatan berbagai sumberdaya yang tersedia. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi aset bagi wilayah

dalam memacu pembangunan di bidang ekonomi secara lebih cepat. Tetapi bisa juga mendatangkan masalah yang serius apa bila tidak disertai dengan peningkatan kualitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Perkembangan penduduk kota makassar menurut kecamatannya tahun 2017 disajikan pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatannya Kota Makassar Tahun 2017

Kecamatan	Penduduk	Persentase
Mariso	62.624	3,75
Mamajang	62.852	3,77
Tamalate	216.699	12,99
Rappocini	172.508	10,34
Makassar	91.224	5,47
Ujung Pandang	28.845	1,73
Wajo	38.338	2,30
Bontoala	66.806	4,00
Ujung Tanah	42.121	2,52
Tallo	174.048	10,43
Panakkukang	172.332	10,33
Manggala	162.347	9,73
Biringkanaya	237.646	14,24
Tamalanrea	124.974	7,49
Jumlah	1.324.131	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2017

B. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar

Pemerintah Kota Makassar dalam usaha untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Berikut ini adalah rincian beberapa sumber penerimaan daerah yang bisa dibidang dominan atau berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar pada tahun 2013-2017.

Tabel 4.3
Rincian Penerimaan Daerah yang Berpengaruh Terhadap
Pendapatan Kota Makassar Tahun 2013-2017

Penerimaan	2013	2014	2015	2016	2017
	Satuan Rupiah				
Bagian Pendapatan Asli Daerah	345.350.562.8 25	556.202.758. 215	621.247.679 .844	742.448.756 .714	828.871.892 .852
Pajak Daerah	266.065.576.9 31	388.445.926. 266	518.703.083 .895	561.697.247 .681	635.674.206 .877
Retribusi Daerah	58.015.145.86 3	69.257.410.5 59	79.650.936. 626	135.776.884 .790	115.220.022 .385
Penerimaan lain-lain	14.914.639.88 5	20.820.918.6 75	22.532.217. 115	33.138.980. 058	64. 615 .641.548

Dana Perimbangan	905.316.278.5 41	1.105.463.60 3.654	1.161.279.5 47.759	1.836.090.9 60.671	1.402.787.5 92.484
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	470.533.278.5 41	455.689.010. 688	578.831.348 .309	62.738.013. 240	720.970.425 .400

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas terlihat pajak daerah adalah sumber terbesar terhadap penerimaan daerah yang memang sumbernya didapat dari daerah itu sendiri, itu disebabkan secara keseluruhan kegiatan perekonomian yang ada tidak lepas dari pemungutan pajak. Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa kota Makassar belum bisa menjadi kota yang mandiri dan masih tergantung kepada pemerintah pusat dikarenakan Dana Perimbangan yang meningkat setiap tahunnya.

Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Makassar dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan di Kota Makassar, berikut penulis menyajikan data tentang perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 2013 sampai tahun 2017. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Perkembangan Jumlah Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Satuan Rupiah)	Perkembangan (%)
2013	621.247.679.844	0,10

2014	742.448.756.714	16,32
2015	828.871.892.852	10,43
2016	971.859.753.606	14,71
2017	1.337.231.047.257	27,32

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)KotaMakassar Tahun 2017

Berdasarkan Tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar secara keseluruhan dapat dikatakan terus mengalami peningkatan namun secara persentase fluktuatif. Pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah sebesar 621.247.679.844 (0,10%), kemudian pada tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 742.448.756.714 (16,32), selanjutnya di tahun 2015 meningkat Rp.828.871.892.852 (10,43%). Pada tahun 2016 sebesar Rp. 971.859.753.606 (14,71%) dan pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.337.231.047.257 (27,32%).

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar setiap tahunnya tidak lepas dari peran pemerintah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan. Cara intensifikasi adalah mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefesienkan cara pemungutannya misalnya, melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan sedangkan cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan sumber penerimaan dengan cara menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru.

Pemerintah menyadari bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan bagian yang turut menentukan suksesnya pembangunan yang dilaksanakan maka pemerintah mengusahakan agar tidak terjadi lagi penurunan atau minimal

mempertahankan nilai yang dicapai sebelumnya dengan jalan peningkatan pengawasan yang intensif dari petugas/aparat yang bersangkutan serta memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya Pendapatan Asli Daerah tersebut dalam menunjang pembangunan.

C. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kota Makassar

Pengeluaran Pemerintah Daerah merupakan kebijakan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan instruksi Menteri dalam Negeri serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi anggaran tersebut mudah dilakukan. Disisi lain anggaran dapat pula menjadi bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Berikut adalah rincian beberapa kegiatan yang bisa dikatakan berpengaruh atau dominan terhadap pengeluaran pemerintah:

Tabel 4.5
Rincian Kegiatan Yang Berpengaruh Terhadap Pengeluaran Pemerintah Tahun 2013-2017

Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
	(Satuan Rupiah)				
B.Pegawai	1.072.077. 237.541	1.076.398. 167.309	1.119.417. 564.276	1.416.545. 867.596	1.519.242. 682.140
B. Barang	403.634.2 80.721	535.515.0 18.617	541.234.56 1.112	559.346.63 1.714	621.313.26 7.412
B.Pemeliharaan	168.460.0 26.058	318.062.3 12.409	341.217.12 7.887	359.318.21 7.817	421.213.31 5.817
Subsidi	27.177.91 2.236	8.315.550. 000	9.523.345. 661	10.612.412 .653	18.318.650 .875

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2017

Tabel 4.5 di atas adalah tabel dari rincian beberapa kegiatan pengeluaran pemerintah Kota Makassar yang bisa dibidang berpengaruh terhadap pengeluaran yang dilakukan pemerintah dan juga mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara keseluruhan belanja terbesar pemerintah Kota Makassar adalah belanja pegawai, itu dikarenakan oleh masuknya tunjangan sertifikasi guru.

Pada umumnya di negara yang sedang berkembang, keuangan pemerintah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena pemerintah dianggap mampu mengelola sumber daya lokal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membiayai pembangunan daerah.

Berikut adalah data jumlah total perkembangan pengeluaran Kota Makassar tahun 2013-2017 :

Tabel 4.6
Perkembangan Jumlah Total Pengeluaran Pemerintah Kota Makassar
Tahun 2013-2017

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Satuan Ribu)	Perkembangan (%)
2013	2.026.737.762	1,11
2014	2.396.879.800	15,44
2015	3.062.274.394	21,73
2016	3.691.385.484	17,04
2017	3.820.105.599	3,37

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2017

Pada Tabel 4.7 tahun 2013 jumlah pengeluaran pemerintah sebesar Rp. 2.026.737.762 (1,11%), sedangkan di tahun 2014 jumlah pengeluaran pemerintah meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.396.879.800(15,44%) dan ditahun 2015 pengeluaran pemerintah sangat meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3.062.274.394 (21,73%), sedangkan ditahun selanjutnya yaitu di tahun 2016perkembangan pengeluaran pemerintah menurun dari jumlah 21,73% menjadi 17,04% yakni sebesar 3,691.385.484 dan pada tahun 2017 jumlah pengeluaran pemerintah sebesar 3.820.105.599 (3,37%).

Meningkatnya pengeluaran pemerintah Kota Makassar setiap tahunnya disebabkan oleh tingkat belanja pegawai yang terus meningkat dapat dilihat pada tabel 4.5 yang dimana belanja pegawai meningkat disebabkan oleh masuknya tunjangan sertifikasi guru.pengeluaran pemerintah yang cenderung semakin meningkat ini sering dengan meningkatnya juga Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar oleh pemerintah daerah. Dari tahun ke tahun pembiayaan pembangunan daerah kota Makassar oleh pemerintah daearah semakin meningkat sehingga memicu meningkatnya pengeluran Pemerintah di Kota Makassar.

D. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Makassar

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Sebutan perubahan penduduk merujuk kepada semua spesies, tapi selalu kepada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai

pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia.

Di Kota Makassar sendiri laju pertumbuhan penduduknya sangat pesat, itu dikarenakan oleh kencangnya laju urbanisasi ke kota dimana banyak alasan mereka untuk pindah ke kota metropolitan seperti Makassar. Pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar yang salah satunya dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat dengan menggunakan teori dimana ketika orang mengeluarkan pendapatannya untuk melakukan konsumsi maka akan menaikkan pendapatan orang lain, Maka dari itu berikut akan disajikan perkembangan total jumlah penduduk di Kota Makassar:

Tabel 4.7
Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Makassar
Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkembangan (%)
2013	1.408.072	1,49
2014	1.429.422	1,48
2015	1.449.401	1,39
2016	1.469.601	1,37
2017	1.769.920	16,97

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2017

Pada Tabel 4.7 tahun 2013 jumlah penduduk Makassar bertambah 1,49% sebesar 1.408.072 jiwa, kemudian pada tahun 2014 jumlah penduduk bertambah 1,29% sebesar 1.429.422 jiwa, selanjutnya ditahun 2015 meningkat lagi 1,39% sebesar 1.449.401 jiwa, pada tahun 2016 jumlah penduduk bertambah 1,37 %

atau sebesar 1.469.601 jiwa, dan di tahun 2017 jumlah penduduk semakin meningkat sebesar 16,97% sebesar 1.769.920 jiwa.

Secara Keseluruhan perkembangan jumlah penduduk di Kota Makassar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah satu penyebab kenaikan tersebut dikarenakan oleh kencangnya laju urbanisasi di Kota Makassar.

E. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh antara Variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara simultan maupun parsial. Serta menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada penelitian ini, analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil pengujian disajikan dalam rekapitulasi hasil analisis regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 4.9
Rekapitulasi Hasil Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (B)	T	Sig
Pengeluaran Pemerintah	1,108	9,613	0,011
Jumlah Penduduk	-5,861	-17,404	0,003
Konstanta = 37.537 R = 0,997 R square = 0,994 F hitung = 156,430 Signifikan F = 0,006			

Sumber : Output Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan pada hasil koefisien regresi (B) di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 37,537 + 1,108 X_1 - 5,861 X_2 + e$$

1. Nilai konstanta sebesar 37,537, maka apabila pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk bernilai konstan, maka nilai dari Pendapatan Asli Daerah 37,537.
2. Nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah sebesar 1,108, maka apabila pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,108 satuan sedangkan yang lainnya konstan.
3. Nilai koefisien jumlah penduduk sebesar -5,861, maka apabila jumlah penduduk meningkat 1satuan maka Pendapatan Asli Daerah akan menurun sebesar 5,861 satuan sedangkan yang lainnya konstan.

1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi uji R² merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi (R²) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X.

Tabel 4.10
Hasil Estimasi Model Pendapatan Asli Daerah

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.997 ^a	.994	.987	.02003	.994	156.430	2	2	.006	3.243

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk

b. Dependent Variable: PAD

Hasil analisis regresi berganda diperoleh nilai R sebesar 0,997. Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah (X_1) dan jumlah penduduk (X_2) mempunyai keeratan hubungan dengan variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 0,997. Pada penelitian ini untuk mengetahui kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan besaran angka R square. Hasil R square di dapat 0.994. Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi semua variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar sebesar 99,4% sisanya 0,6% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

2. Analisis Uji Simultan (Uji F)

Uji F statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independent yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Hasil perhitungan Uji F ini dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.11
Hasil Perhitungan Uji F (Secara Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.126	2	.063	156.430	.006 ^b
	Residual	.001	2	.000		
	Total	.126	4			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk

Hasil analisis regresi berganda, variabel pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan atau bersama-sama menunjukkan hasil nilai Fhitung adalah sebesar 156,430 dengan signifikansi F sebesar 0.006^b atau lebih dari 0,05 (5%) sehingga menolak H₀. Hasil ini menyatakan bahwa secara simultan semua variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Analisis Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara parsial variabel independent terhadap variabel dependent, sementara itu secara parsial pengaruh kedua variabel independent tersebut terhadap variabel dependen ditunjukkan pada tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.12
Hasil Perhitungan Uji t (Secara Parsial)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37.537	1.552		24.179	.002
	Pengeluaran Pemerintah	1.108	.115	.743	9.613	.011
	Jumlah Penduduk	-5.861	.337	-1.346	-17.404	.003

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Output Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan uji parsial melalui analisis regresi berganda. Diperoleh hasil variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah (X_1) dan jumlah penduduk (X_2) terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) secara parsial dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis regresi menunjukkan koefisien regresi (B) sebesar 1,108 terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan signifikan 0.011. Berdasarkan probabilitasnya, jika probabilitasnya lebih kecil 0.05 maka H_1 diterima dan H_0 ditolak atau variabel tersebut berpengaruh signifikan. Dari hasil perhitungan diketahui signifikansi sebesar 0.011 bila dibandingkan dengan tarif signifikansi 0,05, menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari tarif signifikansi ($0,011 < 0,05$) dengan demikian pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.
2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis regresi menunjukkan koefisien regresi (B) sebesar -5,861 terhadap

Pendapatan Asli Daerah, dengan signifikansi 0.003. Berdasarkan probabilitasnya, jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka H_1 diterima dan H_0 ditolak atau variabel tersebut berpengaruh signifikan. Dari Hasil perhitungan diketahui signifikansi sebesar 0.003 bila dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05, menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi ($0,003 < 0,05$), dengan demikian jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

F. Pembahasan

1. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Koefisien regresi sebesar 1,108 dengan tingkat signifikan sebesar 0,011 ($0,011 < 0,05$) dengan nilai t hitung $> t$ tabel ($156 > 9,6130$). Pada tingkat daerah, pengeluaran pemerintah atau belanja daerah tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat semua biaya yang akan digunakan untuk menutupi semua belanja daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah sehari-hari ataupun pelaksanaan pembangunan daerah. Secara keseluruhan belanja terbesar pemerintah Kota Makassar adalah belanja pegawai, itu dikarenakan oleh masuknya tunjangan sertifikasi guru.

Pada umumnya di negara yang sedang berkembang, keuangan pemerintah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena pemerintah dianggap mampu mengelola

sumber daya lokal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membiayai pembangunan daerah.

2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Koefisien regresi sebesar -5,861 dengan tingkat signifikan sebesar 0,003 ($0,003 < 0,05$). Di Kota Makassar sendiri laju pertumbuhan penduduknya sangat pesat, itu dikarenakan oleh kencangnya laju urbanisasi ke kota dimana banyak alasan mereka untuk pindah ke kota metropolitan seperti Makassar. Pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar yang salah satunya dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat dengan menggunakan teori dimana ketika orang mengeluarkan pendapatannya untuk melakukan konsumsi maka akan menaikkan pendapatan orang lain. Namun pada tahun 2013-2017 jumlah penduduk Kota Makassar memiliki pengaruh yang negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab terdahulu dan setelah melakukan uji empirik, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Koefisien regresi sebesar 1,108 dengan tingkat signifikan sebesar 0,011 ($0,011 < 0,05$).
2. Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Koefisien regresi sebesar - 5,861 dengan tingkat signifikan sebesar 0,003 ($0,003 < 0,05$).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Sebaiknya pemerintah lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga ketergantungan biaya pemerintah tidak terlalu besar.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas atau memperbanyak sampel selain di Kota Makassar
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan dapat lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah

variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yani 2008. "*Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*", Raja Grafindo Persada
- Anonim 2010, "*Pendapatan Asli Daerah*" Erlangga, Jakarta
- Anata 2008, "*Analisis Kependudukan*". Erlangga, Jakarta
- Badan Pusat Statistik (BPS) 2018. Kota Makassar
- Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
- Darise, Nuraini. (2009). "*Pengelolaan Keuangan Daerah*". Jakarta : Indeks
- Deliarnov. (2007). "*Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Edisi Revisi*". Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Halim, Abdul dan Mujib Ibnu 2009. "*Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah*". Tesis, Yogyakarta: Sekola "prombel Desentralisasi dan Perimbangan Pascasarjana UGM.
- Hasibun, Nurimmansya 1991. "*Otonomi dan Desentralisasi Keuangan Daerah*". Jakarta : Prisma
- Handayani, Andani. "*Pengaruh Pajak Daerah dan PAD Terhadap Belanja Daerah di Indonesia*" Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Hirawan, Susiyati 1997. "*Penengaruh Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*" Skripsi. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Junaidi dan Arman 2014. "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi*". Prespektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol.2.No.2.
- Mardiasmo 2009, "*Pajak Daerah*". Yogyakarta : BPFE
- Prakosa 2010. "*Pajak dan Retribusi Daerah*". Yogyakarta: UII Press
- Rindu K 2009. "*Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Makassar*". Skripsi. Makassar Fakultas Ekonomi Hasanuddin.

- Santoso dan Rahayu 2005. "*Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*". *Dinamika Pembangunan* Vol.2.No.1.
- Sugiono 2012. "*Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi Mixed Methods*". Bandung : Alfabeta
- Safitri 2009. "*Otonomi Daerah*". Jakarta: Penerbit Kencana.
- Simanjuntak 2011. "*Kependudukan*". Yogyakarta : BPFE
- Srasati El Rani, F.T, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan*" Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sholeh dan Rochmasjah Heru, 2010. "*Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Kelolah Pemerintah yang Baik*". Bandung: Fokusmedi.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004. "*Otonomi daerah*". <https://core.ac.uk>
- UU No 33 Tahun 2004. "*Perimbangan Keuangan*". <https://core.ac.uk>
- Winambo 2013. "*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Bali*". *Analisis Pendapatan* Vol.2.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Hasil Logaritma Natural Pengeluaran pemerintah, Jumlah Penduduk dan PAD

Tahun	Pengeluaran Pemerintah	LN	Jumlah Penduduk	LN	PAD	LN
	(Milyar Rupiah)		(Juta Jiwa)		(Milyar Rupiah)	
2013	1.708.953.047.766	28,17	1.352.136	14,12	397.054.800.801	26,71
2014	1.962.970.441.159	28,31	1.369.606	14,13	556.202.758.215	27,04
2015	2.024.564.662.134	28,34	1.408.072	14,16	621.247.679.844	27,15
2016	700.754.234.000	27,27	1.429.422	14,17	742.448.756.714	27,33
2017	1.383.938.481.000	27,95	1.449.401	14,18	828.871.892.852	27,44

HasilOutput SPSS V16

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
P A D	27.1320	.28700	5
PengeluaranPemerintah	28.0020	.43586	5
JumlahPenduduk	14.1480	.02864	5

Correlations

		P A D	PengeluaranPeme rintah	JumlahPenduduk
Pearson Correlation	P A D	1.000	.501	.983
	PengeluaranPemerintah	.501	1.000	.570
	JumlahPenduduk	.983	.570	1.000
Sig. (1-tailed)	P A D	.	.195	.001
	PengeluaranPemerintah	.195	.	.158
	JumlahPenduduk	.001	.158	.
N	P A D	5	5	5
	PengeluaranPemerintah	5	5	5
	JumlahPenduduk	5	5	5

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.986 ^a	.972	.944	.06806	.972	34.565	2	2	.028	2.983

a. Predictors: (Constant), JumlahPenduduk, PengeluaranPemerintah

b. Dependent Variable: P A D

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.320	2	.160	34.565	.028 ^a
Residual	.009	2	.005		
Total	.329	4			

a. Predictors: (Constant), JumlahPenduduk, PengeluaranPemerintah

b. Dependent Variable: P A D

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error				Beta	Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	121.080	22.098		5.479	.032	216.159	26.001						
	PengeluaranPemerintah	.058	.095	.089	.614	.602	.351	.467	.501	.398	.073	.675	1.482	
	JumlahPenduduk	10.360	1.447	1.034	7.160	.019	4.135	16.586	.983	.981	.849	.675	1.482	

a. Dependent Variable: P A D

Coefficient Correlations^a

Model			JumlahPenduduk	PengeluaranPemerintah
1	Correlations	JumlahPenduduk	1.000	.570
		PengeluaranPemerintah	.570	1.000
1	Covariances	JumlahPenduduk	2.094	.078
		PengeluaranPemerintah	.078	.009

a. Dependent Variable: P A D

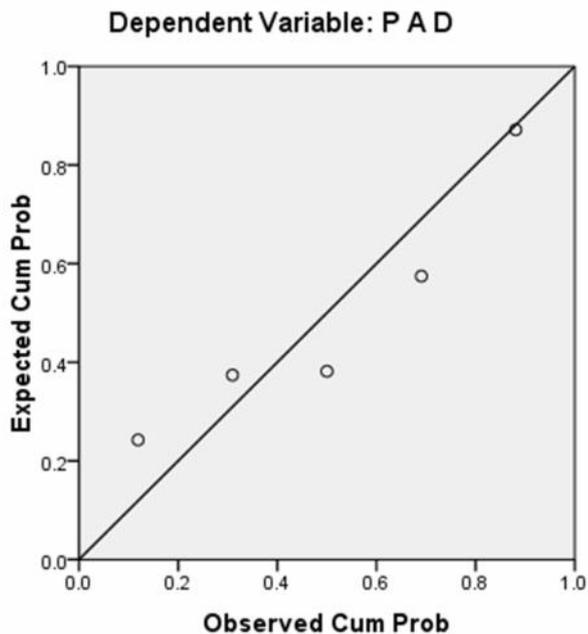
CollinearityDiagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	PengeluaranPemerintah	JumlahPenduduk
1	1	3.000	1.000	.00	.00	.00
	2	1.399	146.412	.00	.62	.00
	3	1.020	1714.546	1.00	.38	1.00

a. Dependent Variable: P A D

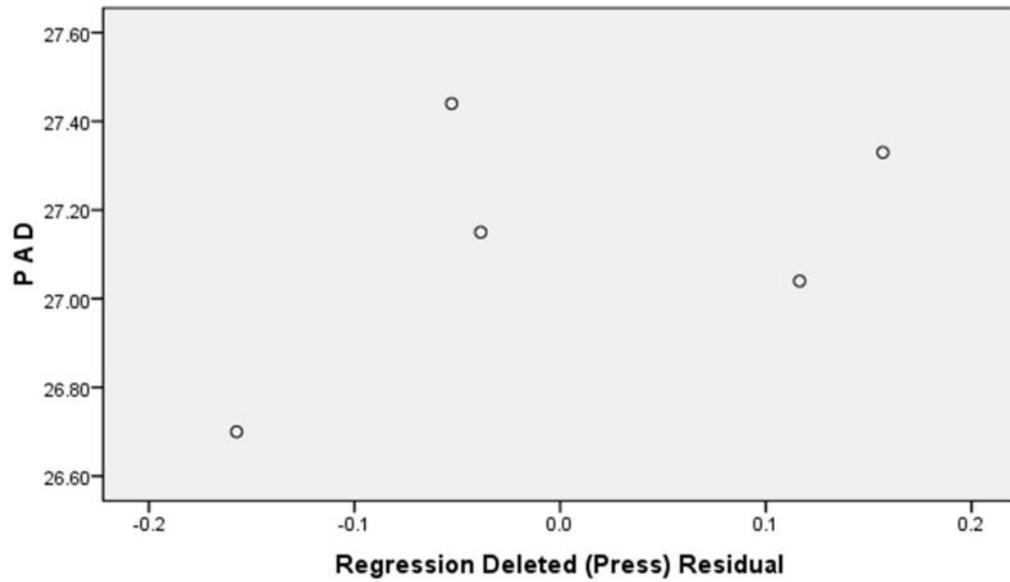
Histogram

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



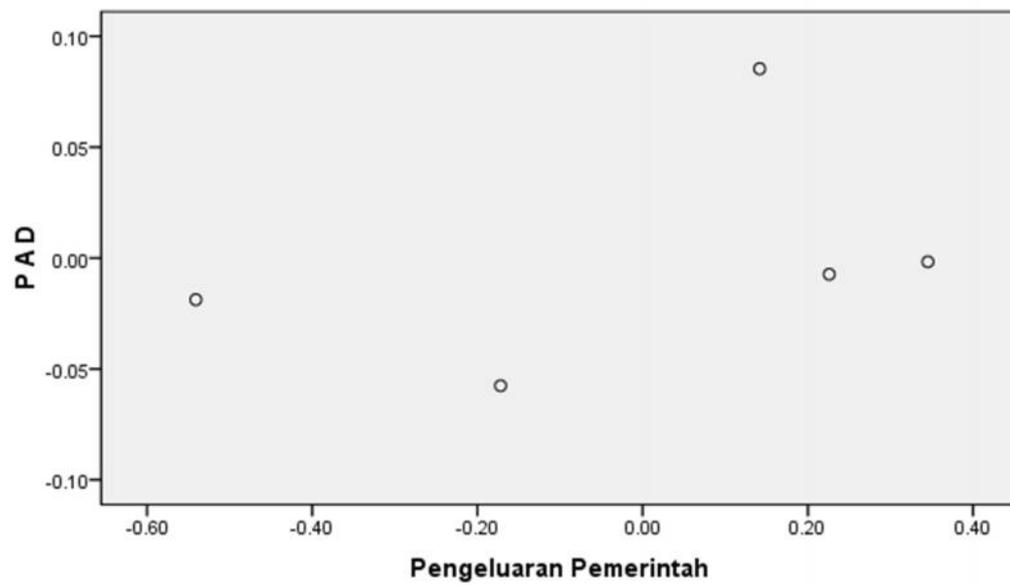
Scatterplot

Dependent Variable: P A D



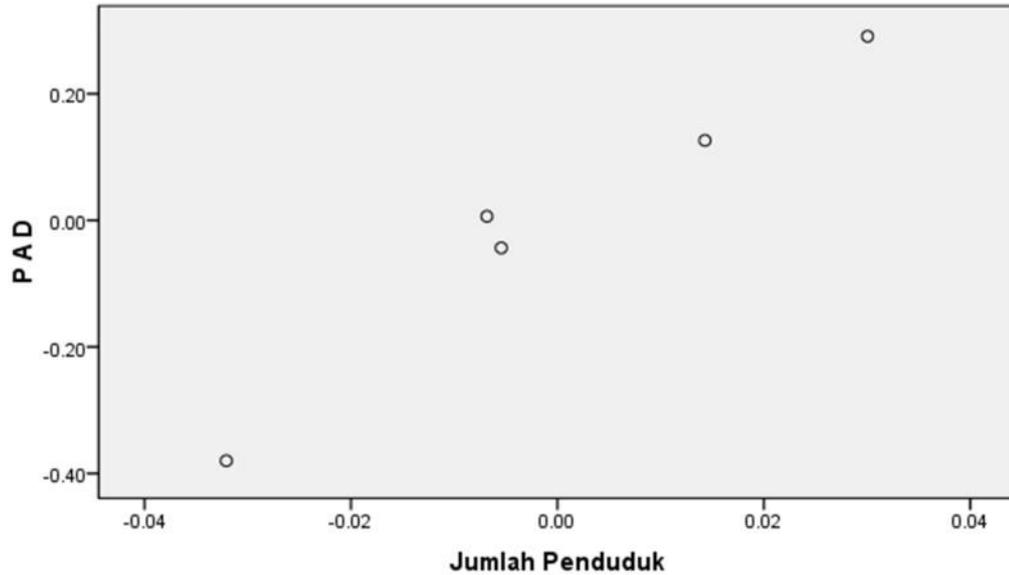
Partial Regression Plot

Dependent Variable: P A D



Partial Regression Plot

Dependent Variable: P A D



Data Penerimaan Daerah Kota Makassar Tahun 2011-2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Penerimaan	(Milyar Rupiah)				
1. Anggaran TahunLalu	161.878.052.383	0	239.997.526.648	255.127.897.713	0
2. BagianPendapatan Asli Daerah	345.350.562.825	556.202.758.215	621.247.679.844	742.448.756.714	828.871.892.852
2.1 Pajak Daerah	266.065.576.931	388.445.926.266	518.703.083.895	561.697.247.681	635.674.206.877
2.2 RetribusiDaearah	58.015.145.863	69.257.410.559	79.650.936.626	135.776.884.790	115.220.022.385
2.3 BagianLaba Badan Usaha Milik Daerah	6.355.200.146	6.488.544.026	361.442.208	11.835.644.185	11.935.754.205
2.4 Penerimaan Dari Dinas-dinas	0	0	0	0	0
2.5 Penerimaan Lin-lain	14.914.639.885	20.820.918.675	22.532.217.115	33.138.980.058	64. 615 .641.548
3. Dana Perimbangan	905.316.278.541	1.105.463.603.654	1.161.279.547.759	1.836.090.960.671	1.402.787.592.484

4.Lain-lain Pendapatan yang Sah	470.533.278.541	455.689.010.688	578.831.348.309	62.738.013.240	720.970.425.400
5.Penerimaan dariPembiayaan	0	0	0	645.694.942	0
	1.883.077.957.2 74	2.046.125.413.850	2.601.356.102.56 0	3.651.435.834.199	3.034.075.535.751

Data Pengangguran Kota Makassar Tahun 2011-2015

Tahun	Wanita	Laki-laki
	(Ribu Jiwa)	
2011	2.343	2.004
2012	4.003	3.200
2013	5.961	5.285
2014	5,364	5,475
2015	5.274	5.052

Log_X1 Log_X2 Log_Y
 NOSIG
 SE.

Notes

	28-AUG-2019 01:03:51
Active Dataset	DataSet0
Filter	<none>
Weight	<none>
Split File	<none>
N of Rows in Working Data File	5
Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair. CORRELATIONS /VARIABLES=Log_X1 Log_X2 Log_Y /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Processor Time	00:00:00.42
Elapsed Time	00:00:00.46

Correlations

	Pengeluaran Pemerintah	Jumlah Penduduk	PAD
Pearson Correlation	1	.685	-.178

N	5	5	5
Pearson Correlation	.685	1	-.837
Sig. (2-tailed)	.202		.077
N	5	5	5
Pearson Correlation	-.178	-.837	1
Sig. (2-tailed)	.775	.077	
N	5	5	5

MEAN STDDEV CORR SIG N
 SE
 DIFF OUTS R ANOVA CHANGE
 (.05) POUT (.10)

Y
 Log_X1 Log_X2
 ZRESID , *ZPRED)
 IN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)
 ZRESID) ALL.

Notes

	28-AUG-2019 01:04:18
Active Dataset	DataSet0
Filter	<none>
Weight	<none>
Split File	<none>
N of Rows in Working Data File	5
Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.

	/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Log_Y /METHOD=ENTER Log_X1 Log_X2 /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) /CASEWISE PLOT(ZRESID) ALL.
Processor Time	00:00:01.75
Elapsed Time	00:00:01.76
Memory Required	1700 bytes
Additional Memory Required for Residual Plots	904 bytes

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
	11.8196	.17775	5
	9.4644	.11927	5
	6.1760	.04080	5

Correlations

	PAD	Pengeluaran Pemerintah	Jumlah Penduduk
PAD	1.000	-.178	-.837
Pengeluaran Pemerintah	-.178	1.000	.685
Jumlah Penduduk	-.837	.685	1.000
PAD	.	.387	.039
Pengeluaran Pemerintah	.387		.101

PAD	5	5	5
Pengeluaran Pemerintah	5	5	5
Jumlah Penduduk	5	5	5

Variables Entered/Removed^a

Entered	Variables Removed	Method
		Enter

PAD

Variables entered.

Model Summary^b

R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson	
			R Square Change	F Change	df1	df2		Sig. F Change
.994	.987	.02003	.994	156.430	2	2	.006	3.243

Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah

PAD

ANOVA^a

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	.126	2	.063	156.430	.006 ^b
	.001	2	.000		
	.126	4			

PAD

Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah

Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	37.537	1.552		24.179	.002
emerintah	1.108	.115	.743	9.613	.011
duk	-5.861	.337	-1.346	-17.404	.003

PAD

Casewise Diagnostics^a

Std. Residual	PAD	Predicted Value	Residual
-.617	11.79	11.8056	-.01236
1.115	11.87	11.8483	.02234
-.600	11.92	11.9305	-.01203
.122	11.99	11.9852	.00245
-.020	11.53	11.5283	-.00039

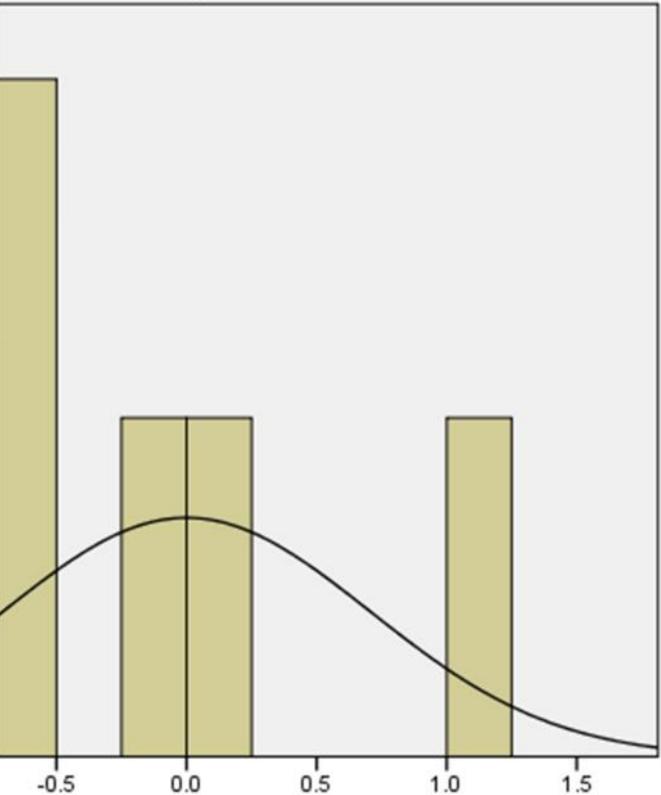
PAD

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
	11.5283	11.9852	11.8196	.17718	5
	-.01236	.02234	.00000	.01417	5
	-1.644	.934	.000	1.000	5
	-.617	1.115	.000	.707	5

PAD

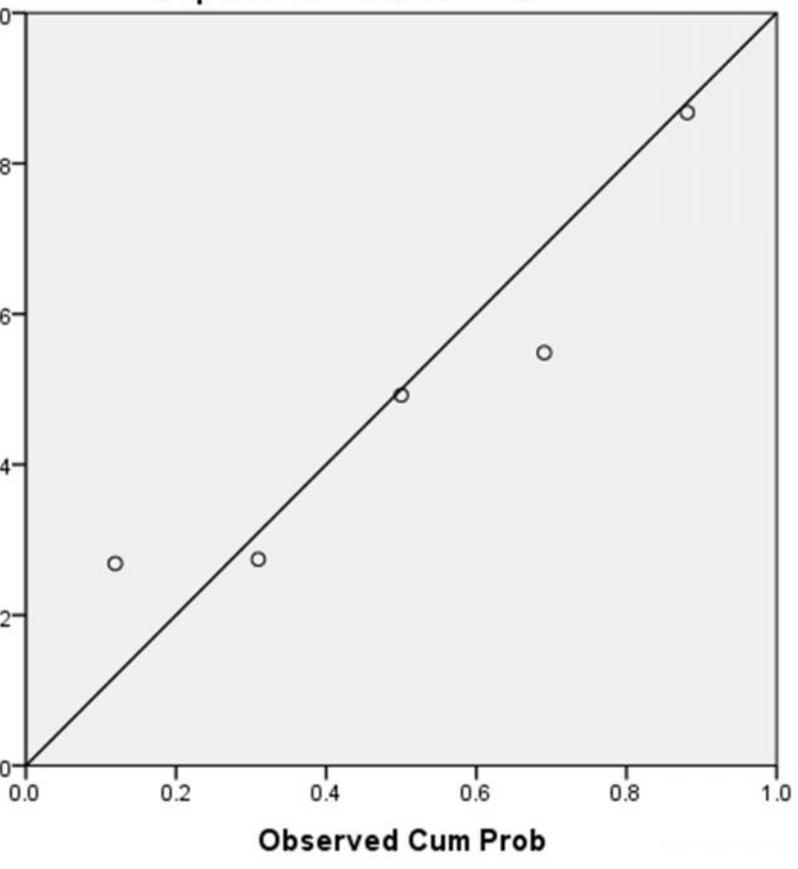
Dependent Variable: PAD



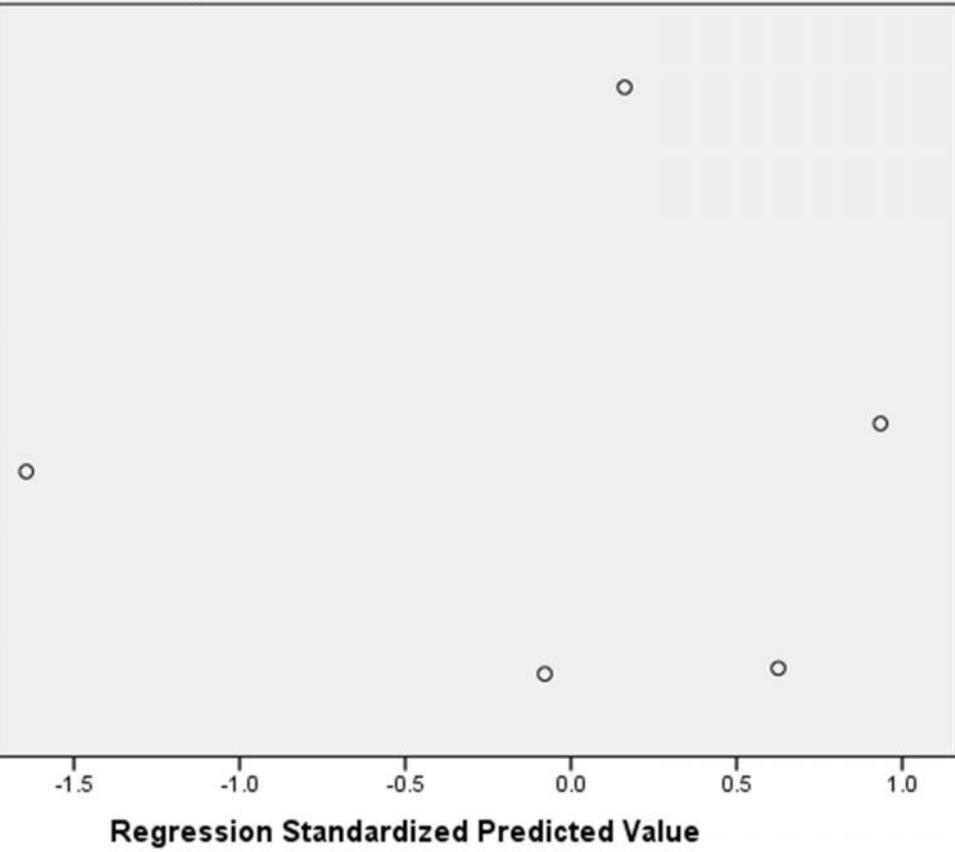
Mean = -3.14E-14
Std. Dev. = 0.707
N = 5

Regression Standardized Residual

Dependent Variable: PAD



Dependent Variable: PAD



X1 Log_X2 Log_Y
(TABLES') ALL

DESCRIPTIVE SCALE CORR COV
MEANS VARIANCE COV CORR.

Active Dataset	DataSet0
Filter	<none>
Weight	<none>
Split File	<none>
N of Rows in Working Data File	5
Matrix Input	
Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
	RELIABILITY /VARIABLES=Log_X1 Log_X2 Log_Y /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR COV /SUMMARY=TOTAL MEANS VARIANCE COV CORR.
Processor Time	00:00:00.03
Elapsed Time	00:00:00.05

VARIABLES

Missing Summary

	N	%
	5	100.0
	0	.0
	5	100.0

based on all variables in the

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	
Based on standardized items ^a	N of Items
.423	3

due to a negative average

This violates reliability model

want to check item codings.

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
	9.4644	.11927	5
	6.1760	.04080	5
	11.8196	.17775	5

Inter-Item Correlation Matrix

	Pengeluaran Pemerintah	Jumlah Penduduk	PAD
	1.000	.685	-.178
	.685	1.000	-.837
	-.178	-.837	1.000

Inter-Item Covariance Matrix

	Pengeluaran Pemerintah	Jumlah Penduduk	PAD
	.014	.003	-.004
	.003	.002	-.006
	-.004	-.006	.032

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Minimum	Variance	N of Items
	9.153	6.176	11.820	5.644	1.914	8.035	3
	.016	.002	.032	.030	18.975	.000	3
	-.002	-.006	.003	.009	-.549	.000	3
	-.110	-.837	.685	1.521	-.818	.466	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
	17.9956	.021	-.025	.989	-1.149 ^a
	21.2839	.038	-.343	.997	-.394 ^a
	15.6404	.023	-.369	.994	.591

due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may
 gs.

Scale Statistics

	Std. Deviation	N of Items
34	.18565	3



Makassar, 22 Juli 2019

Nomor : B-211/BPS/7300/232/07/2019
Lampiran : -
Perihal : **Bukti Telah Melakukan Penelitian**

Kepada Yth,
Ketua LP3M
UNISMUH Makassar
di-

Makassar

Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Sulawesi Selatan Nomor : 19100/S.01/PTSP/2019 Tanggal 09 Juli 2019 perihal Izin Penelitian, maka disampaikan bahwa peneliti yang namanya tersebut dibawah ini :

N a m a : IRDAYANI
Nomor Pokok : 105710224015
Program Studi : IESP
Pekerjaan : Mahasiswi (SI)

Benar telah mengambil data di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Penelitian dengan judul : **"PENGARUH INFLASI, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR"**

Demikian penyampaian kami untuk dipergunakan seperlunya.

An. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan
Kasi Desiminasi Dan Layanan Statistik



Mansyur Madiang
Mansyur Madiang, SE, M.Si

NIP. 196906241989021001

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama **Irdayani**, Lahir di Desa Arellae Pada Tanggal 04 Januari 1997. Anak ke 5 dari 5 bersaudara, pasangan Bapak Firman dengan Ibu Mariati. Penulis Mengawali pendidikan formal pada tahun 2003 di SD Inpres 10/73 Arallae dan Tamat pada tahun 2009, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Salomekko dan Tamat pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun yang sama pula Penulis melanjutkan pendidikan di Alyah Palattae dan Tamat pada tahun 2015.

Melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi swasta di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2015, penulis berhasil lolos seleksi dan terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.